

PENGUASAAN HAK PEMANFAATAN TANAH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) OLEH ANAK PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK

(STUDI KASUS PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DENGAN PT INDONESIA COMNETS PLUS (ICON+))

Novia Irdasari

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan dan pertanggung jawaban pemakaian hak pemanfaatan tanah induk perusahaan oleh anak perusahaan terhadap tanah hak pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Perubahan ke-4, yang mewajibkan kaedah hukum melekat dalam setiap kegiatan, di lihat melalui ranah perekonomian di Indonesia, lahirlah beragam Badan Usaha yang bertujuan untuk menciptakan *multiplier effect*, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang terbagi menjadi beberapa bentuk diantaranya, Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbuka, dan Perusahaan Umum, yang masing-masing memiliki kewajiban selain mendapatkan keuntungan, juga diharuskan memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi barang dan jasa, sebagai peran negara dalam melaksanakan upaya pelayanan publik, tidak jarang ditemukan beragam konflik antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan kegiatan operasionalnya, yang diawali dari perbenturan kepentingan dan tanggung jawab, kurangnya kepastian hukum terhadap batasan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan aset tanah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang dirasa mendapatkan hak terlebih dahulu.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Hak Pemanfaatan Tanah, Anak Perusahaan, Aset Tanah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

**THE AUTHORIZATION OF THE LAND STATE-OWNED
ENTERPRISES (SOEs) USE RIGHTS BY A SUBSIDIARY TO
FULFILL PUBLIC SERVICE FUNCTION**

**(A CASE STUDY OF INDONESIAN RAILWAYS COMPANY WITH
PT INDONESIA COMNETS PLUS (ICON+))**

Novia Irdasari

Abstract

This research intend to find out the linkages and the responsibility of the land State-Owned Enterprises (SOEs) use rights by a subsidiary. This research uses a Normative Juridical as a method or library research which is conducted by reviewing the data based on primary source, secondary source, and tertiary sources based on a descriptive analytics. Indonesia is a state of law, as stated in Article 1 Paragraph (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, which requires legal rules to be attached to every activity, as seen through the economic sphere in Indonesia, there are many various business entities were formed which aimed to create a multiplier effect, as example State-Owned Enterprises (SOEs), that divided into several forms, such as, Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbuka, Perusahaan Umum, each of them have a duty not only for get a benefit, but also required to complete the needs of people, as the states role in carrying out the efforts of public services, by the operational between the State-Owned Enterprises (SOEs), we may see that there are also some of a variety conflict between SOEs, that started from the clash of interest and responsibilities, due to a lack of legal certainty regarding the limitations of rights and obligations in utilizing State-Owned land assets, that causes a loss to one of the parties who are considered to get the right first.

Key Words : State-Owned Enterprises (SOEs), The Authorization Of The Land, Subsidiary, State-Owned Land Assets